

lambat”, apabila diperbandingkan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian satuan Wilayah Tapal Kuda secara umum.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ekonomi Regional

Menurut Richardson (2001), disiplin ekonomi regional adalah merupakan cabang yang relatif baru dari ilmu ekonomi. Ekonomi regional adalah disiplin ilmu ekonomi yang membahas pembangunan ekonomi yang mengutamakan kepentingan peran setiap daerah/wilayah dalam proses perkembangan nasional secara optimal.

Menurut Sukirno (1998), analisa ekonomi regional pada hakekatnya membahas mengenai kegiatan perekonomian ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan ekonomi berbagai lokasi dalam suatu “*economic space*” atau ruang ekonomi tertentu, misalnya dalam satu negara atau satu provinsi. Tetapi disamping itu analisa ekonomi regional melibatkan dirinya pula dalam menganalisa ekonomi sesuatu daerah ditinjau secara sektoral dan secara makro. Daerah tersebut dapat berupa satu provinsi, satu kabupaten, satu daerah khusus tertentu atau satu kota besar yang pembangunannya akan digalakkan. Analisa mengenai perekonomian kota besar merupakan suatu cabang khusus dari analisa ekonomi regional dan dikenal sebagai analisa ekonomi urban (*urban economic*).

Regionalisasi adalah proses penentuan batas-batas daerah. Proses ini dapat mempunyai beberapa bentuk, tergantung pada maksud regionalisasi, kriteria yang akan digunakan dan ketersediaan data. Demikianlah, seperti telah disebutkan terdahulu, pemecahan persoalan kemerosotan ekonomi dapat mencakup penentuan batas-batas daerah formal dengan menggunakan kriteria tertentu yang relevan, dan pemecahan persoalan kongesti dapat mencakup penentuan batas daerah-daerah fungsional. Dalam hal data yang memadai tidak tersedia, dipergunakan cara pendekatan intuitif yang bersifat kualitatif, tetapi hal ini cenderung menghasilkan batas-batas daerah yang sangat “kabur”, yang malahan semakin kabur jika batas-batas tersebut semakin diteliti lebih seksama. Dapat

dimengerti mengapa orang telah beralih kepada cara-pendekatan yang lebih kuantitatif mengenai pengidentifikasian daerah (Sitohang, 1977).

Perencanaan regional adalah serupa dengan tipe-tipe perencanaan lainnya, yakni bahwa perencanaan regional memiliki sifat-sifat dasar yang sama dan mungkin merupakan suatu kombinasi dari berbagai macam bentuk alternatif. Namun demikian, perbedaannya ada yakni bahwa perencanaan regional adalah berkenaan dengan sesuatu daerah. Pada umumnya daerah (*region*) adalah suatu konsep yang luwes, yang berkenaan dengan berbagai macam daerah dan tempat yang terdapat antara tingkat nasional dan tingkat kota. Dalam hal ini, perencanaan regional dapat dipandang sebagai salah satu jenis dari suatu perencanaan yang proses perumusan dan penegasan tujuan-tujuan sosial dalam penataan kegiatan-kegiatan dalam ruang diatas tingkat perkotaan (Sitohang, 1977).

2.2.2 Pendefinisian Daerah

Menurut Glasson (1977), daerah adalah suatu metode klasifikasi, suatu alat untuk memisahkan sifat-sifat areal, dimana satu-satunya daerah “alamiah” (*natural region*) hanyalah permukaan bumi tempat manusia bermukim. Pandangan obyektif menganut posisi sebaliknya, memandang daerah sebagai suatu tujuan tersendiri, suatu kebulatan riil, suatu organisme, yang dapat diidentifikasi dan dipetakan.

Menurut Sukirno (1976), ada 3 (tiga) pengertian tentang daerah di dalam konsep pandangan obyektif. Ketiga pengertian ini, umum digunakan dalam analisis ekonomi regional (*regional economic analysis*), yaitu: (a) Daerah *homogeneous*, (b) Daerah *nodal*, dan (c) Daerah administratif atau daerah perencanaan.

(a) Konsepsi Daerah Homogeneous (*Homogeneous Region*)

Daerah homogeneous (*homogeneous region*), adalah daerah yang di dalam konteks pandangan subyektif disebut sebagai daerah formal. Daerah *homogeneous* atau daerah homogen ini, adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat/ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat dan ciri-ciri

homogeneous tersebut, misalnya dalam hal ekonomi, daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/miskin, geografi (wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama), agama, suku, dan sebagainya (Sukirno, 1976).

(b) Konsepsi Daerah Nodal (*Nodal Region*)

Menurut Sukirno (1976), daerah *nodal* sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Struktur daerah *nodal* dapat digambarkan sebagai suatu sel hidup, atau suatu atom, dimana terdapat inti (*nucleus*) dan plasma (*periferi*) yang saling melengkapi.

Menurut Wibowo (1998), wilayah nodal pada dasarnya dilandasi oleh adanya faktor ketidak-merataan atau faktor heterogenitas, akan tetapi satu sama lain saling berhubungan erat secara fungsional. Dengan demikian struktur dari Wilayah Nodal tersebut dapat digambarkan sebagai satu sel yang hidup atau sebuah atom, dimana terdapat satu inti (pusat, central, metropolis) dan wilayah periferi (pinggiran, hinterland) yang merupakan bagian sekelilingnya yang bersifat komplementer (saling melengkapi) terhadap intinya. Dalam hal ini, Wilayah Nodal terdiri dari bagian-bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Walaupun secara fungsional mereka berkaitan satu sama lain. Pada struktur yang demikian *integrasi fungsional* akan lebih merupakan dasar hubungan-hubungan atau dasar dari kepentingan masyarakat di dalam wilayah semacam itu, dari pada homogenitas semata-mata.

Menurut (Hoover, 1975 dalam Budiharsono, 2001), batas daerah *nodal* ditentukan sejauh mana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi apabila digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan menurut (McLellan, 1970 dalam Sukirno, 1976), perbatasan diantara berbagai daerah *nodal* ditentukan oleh tempat-tempat dimana pengaruh dari satu atau beberapa pusat-pusat kegiatan ekonomi digantikan dengan pengaruh dari pusat lainnya.

(c) Konsepsi Daerah Administratif (*Administrative Region*)

Menurut Sukirno (1976), daerah administratif adalah sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administratif tertentu. Lebih tepatnya bila dalam melaksanakan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah. Dengan demikian adalah lebih praktis apabila pembangunan wilayah didasarkan pada satuan wilayah administratif yang telah ada.

(d) Konsepsi Daerah Perencanaan (*Planning Region*)

Menurut Budiharsono (2001), daerah perencanaan (*planning region* atau *programming region*) adalah sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Daerah perencanaan lebih menekankan pada tinjauan dari aspek fisik dan ekonomi dimana perencanaan tersebut sudah melampaui lintas batas wilayah administratif.

Menurut Wibowo (1998), pada dasarnya, wilayah administrasi atau wilayah perencanaan adalah wilayah yang menjadi ajang penerapan keputusan-keputusan ekonomi. Region ini umumnya dibatasi oleh kenyataan bahwa unit wilayahnya berada di dalam kesatuan kebijakan atau administrasi. Sebagai contoh adalah wilayah yang tergolong dalam kategori Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan sebagainya. Dapat juga pembagian dilakukan menurut kriteria region yang karena sifat alaminya harus direncanakan secara bersama atau serentak, seperti wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai).

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional

Menurut teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah/wilayah ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu (Sukirno, 1976): (a) tingkat penanaman modal yang terjadi di suatu daerah tersebut, dan (b) besarnya *capital output ratio* masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan/atau bentuk-bentuk kesenjangan antar daerah, dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkat penanaman modal dan perbedaan besarnya *capital ouput ratio* masyarakat.

Sementara itu menurut teori neo-klasik, perkembangan ekonomi di suatu daerah/wilayah pada dasarnya merupakan bagian integral dari perkembangan ekonomi nasional, dimana ditentukan oleh 3 (tiga) faktor (Richardson, 2001), yaitu: (a) penambahan dalam alat modal (*capital accumulation*), (b) penambahan dalam tenaga kerja, dan (c) kemajuan teknologi. Akan tetapi di dalam analisis ekonomi regional terdapat 2 (dua) teori populer yang dikembangkan, pada khusus guna menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah, yaitu (Sukirno, 1976): (a) teori *export base* atau teori yang mengemukakan tentang peranan sektor ekspor, dan (b) teori *resource base* atau teori yang mengemukakan tentang pentingnya peranan kekayaan alam.

Menurut teori *export base* atau teori peranan sektor ekspor, laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah dipengaruhi (ditentukan) oleh perkembangan sektor ekspor di daerah/wilayah tersebut. Ditegaskan oleh Sukirno (1976), pengertian ekspor dalam hal ini adalah ekspor 'ke luar' daerah/wilayah lain, termasuk ekspor ke luar negara/keluar negeri. Teori *export base* juga mengemukakan, peranan sektor ekspor dalam pembangunan ekonomi suatu daerah/wilayah ini akan bertambah penting apabila penduduk dan modal tidak mengalir masuk (atau keluar) secara berlebih-lebihan ke daerah/wilayah yang bersangkutan.

Teori *export base* menyatakan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemunduran sektor-sektor ekspor di suatu daerah/wilayah, yaitu antara lain (Djojodipuro, 1992): (a) adanya perubahan permintaan dari dan/atau di luar daerah yang bersangkutan, (b) perubahan teknologi yang merubah komposisi dari *input*, dan (c) berkurangnya dan/atau kehabisan cadangan kekayaan alam sebagai *input* produksi.

Sementara itu menurut teori *resource base*, mengemukakan bahwa laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah selain ditentukan peranan sektor ekspor, juga ditentukan antara lain oleh (Djojodipuro, 1992): (a) perkembangan/laju pertumbuhan produksi sektor-sektor perekonomian daerah tersebut, (b) potensi dan produksi kekayaan alam daerah yang bersangkutan, dan (c) besarnya *multiplier effect* dari sektor ekspor dalam perekonomian daerah tersebut.

Teori *resources base* dapat dipandang sebagai penyempurnaan dari teori *export base*. Menurut Richardson (2001), karena selain memandang faktor sektor ekspor daerah sebagai penentu laju perkembangan atau pertumbuhan perekonomian suatu daerah, juga memandang potensi dan produksi kekayaan alam (sumberdaya alam/SDA) sebagai faktor yang juga menentukan laju perkembangan atau pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Selain itu, juga memandang bahwa tingkat *multiplier* sektor ekspor suatu daerah juga merupakan faktor yang sangat menentukan laju perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang bersangkutan.

Teori *resource base* menganalisa mengenai aspek-aspek yang lebih berkembang dari analisa dalam teori *export base*, karena analisa tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sebab-sebab berkembangnya berbagai daerah dari masa ke masa (Richardson, 2001). Daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam atau kekayaan alam yang lebih besar dari daerah lainnya, akan cenderung memiliki potensi perkembangan ekonomi yang lebih baik. Terutama jika sumber-sumber kekayaan alam tersebut merupakan komponen utama *input* dalam produksi industrinya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor ekspor daerah.

Teori *resource base* ini selanjutnya juga menganalisa pula mengenai mekanisme dan karakteristik pertumbuhan suatu daerah. Dimana pembangunan daerah pada permulannya timbul sebagai akibat dari timbulnya kesanggupan suatu daerah untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh perekonomian dan mengekspornya dengan harga dan kualitas yang bersaing dengan barang yang sama atau sejenis yang diproduksi di daerah lainnya. Kesanggupan mengekspor ini, akan menciptakan pendapatan untuk daerah tersebut, dan melalui *multiplier effect* akan memperluas lagi pendapatan daerah tersebut (Sukirno, 1976).

2.2.4 Basis Ekonomi (*Bace Ekonomik*)

Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ketempat-tempat diluar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau memasarkan barang-barang dan jasa-jasa kepada orang-orang yang datang dari pembatas perekonomian daerah bersangkutan. Sedangkan kegiatan-kegiatan bukan basis (*non basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan tidak mengekspor barang, daerah pemasaran bersifat lokal.

Menurut Glasson (1977) terdapat tiga pendekatan secara tidak langsung untuk memisahkan antara kegiatan basis dan bukan basis. Ketiga pendekatan tersebut dapat digunakan salah satu atau gabungan dari ketiga metode tersebut. Tiga metode tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Menggunakan asumsi-asumsi atau metode arbitrer sederhana yang mengasumsikan bahwa semua sektor primer dan manufaktur adalah basis, dan semua sektor jasa bukan basis. Metode ini tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam suatu kelompok sektor ekonomi bisa terdapat sektor ekonomi yang menghasilkan barang export atau impor ataupun keduanya.
- (b) Metode kedua yaitu *Location Quotient* (LQ), memperoleh sambutan yang lebih besar dalam kalangan akademik, tetapi mempunyai reliabilitas yang tidak jauh lebih besar dari metode pertama. Dimana pengambilan keputusan dari hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut;
 - (i) Jika nilai ratio lebih besar dari pada 1 ($LQ > 1$), menunjukkan kegiatan dalam suatu sektor perekonomian tersebut sebagai kegiatan basis (*base activities*). Artinya bahwa, kegiatan produksi barang-barang atau jasa-jasa dalam sektor perekonomian yang dilakukan di daerah/wilayah tersebut, sudah dapat mencukupi kebutuhan “di dalam” wilayah/daerah yang

bersangkutan, dan juga daerah/wilayah tersebut sudah melakukan kegiatan ekspor terhadap produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut “ke luar” batas-batas daerah/wilayah.

- (ii) Jika nilai ratio lebih kecil dari pada 1 ($LQ < 1$), menunjukkan kegiatan dalam suatu sektor perekonomian tersebut sebagai kegiatan bukan basis (*non-base activities*). Artinya bahwa, kegiatan produksi barang-barang atau jasa-jasa dalam sektor perekonomian yang dilakukan di daerah/wilayah tersebut, belum dapat mencukupi kebutuhan “di dalam” wilayah/daerah yang bersangkutan. Untuk mencukupi kebutuhannya daerah/wilayah yang bersangkutan harus melakukan impor “dari” daerah/wilayah lainnya.

Intepretasi pengambilan keputusan tersebut adalah berlaku untuk sektor ekonomi yang *tradable*. Sektor ekonomi *tradable* adalah sektor ekonomi yang produksinya “dapat” diperdagangkan antar daerah/wilayah, atau “dapat” melintasi batas-batas daerah/wilayah. Contohnya adalah produksi sektor pertanian, perdagangan, pertambangan dan penggalian, jasa-jasa, dan lainnya.

Sebaliknya jika sektor ekonomi tersebut adalah sektor yang *non-tradable*, atau produksinya “tidak dapat” diperdagangkan (dibawa untuk diperdagangkan) “ke luar” dari batas-batas daerah/wilayah, misalnya; sektor bangunan/konstruksi dan sektor hotel dan restoran, maka intepretasinya adalah sebagai berikut;

- (i) Jika teridentifikasi sebagai sektor basis, artinya sektor ekonomi di daerah/wilayah yang bersangkutan memiliki “tingkat percepatan pertumbuhan” produksi yang “lebih besar” dari pada “tingkat percepatan pertumbuhan” sektor yang bersangkutan dalam daerah/wilayah yang lebih luas sebagai pembandingnya. Demikian pula dapat memberikan intepretasi bahwa, produksi sektor ekonomi yang bersangkutan “mampu menarik” orang-orang “di luar” batas-batas daerah/wilayah yang bersangkutan, untuk membelanjakan uangnya “ke” daerah/wilayah yang bersangkutan.
- (ii) Jika teridentifikasi sebagai sektor non-basis, artinya sektor ekonomi di daerah/wilayah yang bersangkutan memiliki “tingkat percepatan pertumbuhan” produksi yang “lebih kecil” dari pada “tingkat percepatan pertumbuhan” sektor yang bersangkutan dalam daerah/wilayah yang lebih

luas sebagai pembandingnya. Demikian pula dapat memberikan interpretasi bahwa, produksi sektor ekonomi yang bersangkutan “belum mampu” mencukupi kebutuhan konsumsi di dalam daerah/wilayah sendiri, sehingga membuat orang-orang “di dalam” daerah/wilayah tersebut membelanjakan uangnya “ke luar” daerah/wilayah.

- (c) Metode ketiga yaitu kebutuhan minimal (*minimum requirements*) adalah modifikasi dari LQ, dengan menggunakan distribusi minimal dari *employment* yang diperlukan untuk menopang industri regional bukan industri rata-rata. Untuk setiap daerah yang pertama dihitung adalah persentase angkatan kerja regional yang diperkerjakan di dalam sektor ekonomi tersebut. Kemudian persentase tersebut dibandingkan dengan perhitungan hal-hal yang bersifat berlainan, dan presentase terkecil dipergunakan sebagai ukuran kebutuhan minimal dari sebuah sektor ekonomi. Dibandingkan dengan metode LQ, metode ini lebih bersifat arbitrer karena sangat tergantung pada pemilihan persentase minimal dari sektor ekonomi.

Location Quotients (kuosien lokasi) atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Ada banyak variable yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja. Menggunakan LQ digunakan sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut (Tarigan, 2006).

Dengan formulasi (Budiharsono, 2001):

$$LQ_{sub} = \frac{(SE_{sub}/PDRB_{sub})}{(SE_{glob}/PDRB_{glob})}$$

Dimana:

LQ_{sub} = Indeks LQ sektor ekonomi *ke-i* di suatu daerah.

SE_{sub} = Nilai sektor ekonomi *ke-i* dalam PDRB daerah yang bersangkutan.

$PDRB_{sub}$ = Nilai PDRB daerah yang bersangkutan.

SE_{glob} = Nilai sektor ekonomi *ke-i* dalam PDRB kawasan yang lebih luas, dimana daerah tersebut menjadi bagiannya.

$PDRB_{glob}$ = Nilai PDRB kawasan yang lebih luas, dimana daerah tersebut menjadi bagiannya.

Dengan menggunakan metode pendekatan analisis LQ ini, sebagaimana diambil dari interpretasi yang disampaikan oleh Budiharsono (2001), akan dapat dibaca kriteria dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut:

- (1). Apabila nilai indeks LQ suatu sektor/sub-sektor ekonomi adalah 'lebih besar' dari 1 (satu), atau $LQ \geq 1$, maka mengidentifikasi bahwa sektor/sub-sektor ekonomi yang bersangkutan adalah sektor/sub-sektor ekonomi 'basis'.
- (2). Apabila nilai indeks LQ suatu sektor ekonomi adalah 'lebih kecil' dari 1 (satu), atau $LQ < 1$, maka mengidentifikasi bahwa sektor/sub-sektor ekonomi yang bersangkutan adalah sektor/sub-sektor ekonomi 'bukan basis' atau 'non-basis'.

Apabila suatu sektor ekonomi teridentifikasi sebagai "sektor basis" dalam perekonomian regional daerah, maka daerah tersebut telah melakukan "ekspor" dari produk-produk sektor ekonomi yang bersangkutan "ke luar" batas-batas daerah. Daerah ini telah terjadi "kelebihan" produk-produk dari sektor ekonomi yang bersangkutan, sehingga dilakukan "ekspor" kelebihannya "ke luar" batas-batas daerah. Kriteria ini dapat mencerminkan juga bahwa, sektor ekonomi tersebut memiliki "keunggulan relatif" di daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya apabila suatu sektor ekonomi teridentifikasi sebagai "sektor non-basis" dalam perekonomian regional daerah, maka daerah tersebut telah melakukan "impor" produk-produk sektor ekonomi yang bersangkutan "dari luar" batas-batas daerah. Karena produk-produk sektor ekonomi yang bersangkutan "di dalam" daerah, tidak/belum dapat mencukupi kebutuhan "di dalam" daerah yang bersangkutan. Kriteria ini dapat mencerminkan juga bahwa, sektor ekonomi yang bersangkutan tidak/kurang memiliki "keunggulan relatif" di daerah tersebut.

Untuk sektor-sektor ekonomi yang *un-tradable* atau tidak dapat diperdagangkan (dibawa untuk diperdagangkan) “ke luar” batas-batas daerah, seperti halnya bangunan/konstruksi, maka jika indeks LQ-nya bernilai “lebih besar dari 1 (satu)” dapat mengintepresikan bahwa, di daerah tersebut telah terjadi pertumbuhan produk sektor ekonomi yang bersangkutan, yang “lebih besar” dari pertumbuhan produk sektor ekonomi yang bersangkutan secara nasional.

Sebaliknya jika sektor ekonomi yang *un-tradable* tersebut memiliki indeks LQ “lebih kecil dari 1 (satu)”, maka di daerah tersebut telah terjadi pertumbuhan produk sektor ekonomi yang bersangkutan, yang “lebih kecil” atau “lebih rendah” dari pertumbuhan produk sektor ekonomi yang bersangkutan secara nasional.

Menurut Arsyad (1999) analisis LQ ini dapat digunakan secara efektif dengan asumsi bahwa pertama pola permintaan penduduk bersifat *homogeny* artinya setiap penduduk di wilayah penelitian dianggap memiliki pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional. Kedua, produksi di wilayah tersebut pertama-tama digunakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri dan selebihnya diekspor ke luar wilayah tersebut. Ketiga, produktivitas sektor regional sama dengan produktivitas nasional.

2.2.5 Teori Penggandaan Basis (*Base Multiplier*)

Implisit di dalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab dan akibat yang membentuk teori basis ekonomi. Bertambah banyaknya kegiatan basis didalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Begitu juga sebaliknya, semakin berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan dan turunya permintaan terhadap produk bukan basis. Dengan demikian sesuai dengan namanya kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*prime over role*) dimana setiap perubahan mempunyai dampak penggandaan (*multiplier*) terhadap perekonomian regional (Glasson, 1977).

Dimana formulasi yang umum digunakan dalam basis ekonomi regional pada dasarnya adalah sebagai berikut;

$$\mathbf{T} = \mathbf{B} + \mathbf{NB}$$

$$\mathbf{NB} = \mathbf{aT}.$$

Dimana:

T = Total *income* regional suatu daerah/wilayah

B = Total *income* sektor basis

NB = Total *income* sektor non-basis

A = Koefisien yang menyatakan proporsi dari total pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas non-basis dalam perekonomian daerah/wilayah.

Jika persamaan tersebut di atas disubstitusikan maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut;

$$\mathbf{T} = \mathbf{B} + \mathbf{aT}$$

$$\mathbf{T} - \mathbf{aT} = \mathbf{B}$$

$$\mathbf{T} (1-\mathbf{a}) = \mathbf{B}$$

$$\mathbf{T} = 1/(1-\mathbf{a})\mathbf{B}$$

Dimana:

“ $(1/(1-\mathbf{a}))$ ” = adalah nilai koefisien penggandaan basis

Dari rumus tersebut sebelumnya, menyatakan bahwa sektor non-basis mendapatkan bagian dari pendapatan dari sektor basis yang besarnya tercermin dari nilai “a”. Dimana dalam model ini diasumsikan tidak adanya kemungkinan dari sektor basis untuk mendapatkan bagian dari sektor basis. Atau “a” dalam persamaan tersebut menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam aktivitas ekonomi sektor non basis terhadap aktivitas total.

Menurut Tiebout dalam Supriono (2004), mengembangkan rumus penggandaan basis (*base multiplier*) sebagai berikut:

$$\text{Penggandaan basis} = \frac{\text{Pendapatan total}}{\text{Pendapatan basis}}$$

Perubahan pendapatan total = (penggandaan basis) X (perubahan pendapatan basis)

Untuk memudahkan pengertian rumus di atas, maka digunakan simbol untuk mengganti kata-kata tersebut, seperti yang disajikan berikut:

Y = Pendapatan total.

YB = Pendapatan basis.

YN = Pendapatan non-basis.

M = Penggandaan basis.

Dengan menggunakan simbol-simbol tersebut, maka rumus diatas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = M \times YB$$

$$M = \frac{Y}{YB} = \frac{1}{\frac{YB}{Y}} = \frac{1}{\frac{Y - YN}{Y}} = \frac{1}{1 - \frac{YN}{Y}}$$

Sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut;

$$Y = \frac{1}{1 - \frac{YN}{Y}} \times YB$$

Dimana:

YN/Y = Menggambarkan proporsi dari total pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas non-basis dalam perekonomian wilayah.

YN/Y = Nilai "a" ((cat; dalam rumus yang dikonsepsikan Glasson (1978))

Rumus penggandaan basis (*base multiplier*) tersebut di atas digunakan untuk menghitung nilai penggandaan basis per tahun (tahunan). Alternatif cara lain yang dapat digunakan untuk menghitung nilai penggandaan basis adalah dengan menggunakan “pertolongan” persamaan regresi, atau cara “penelusurannya” dapat digunakan dengan menggunakan “pertolongan” persamaan regresi, yaitu sebagai berikut:

$$Y_N = a_0 + a_1 (Y) + e$$

Dimana:

Y_N = Nilai *income* sektor non-basis.

Y = Nilai *income total*

a_0 = Konstanta/*intercept*

a_1 = Koefisien regresi yang dapat menyatakan proporsi dari total pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas non-basis dalam perekonomian daerah/wilayah.

e = *Error term*.

Kemudian nilai penggandaan basisnya (*base multiplier*) di cari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$M = \frac{1}{1 - (a_1)}$$

Dimana:

M = Nilai penggandaan basis

a_1 = Koefisien regresi yang dapat menyatakan proporsi dari total pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas non-basis dalam perekonomian daerah/wilayah.

Menurut Budiharsono (2001), masalah paling mendasar pada model ekonomi basis ini adalah masalah *time-lag*. Hal ini diakui, bahwa penggandaan basis (*base multiplier*) tidak berlangsung secara tepat, karena membutuhkan *time-lag* antara respon dari sektor basis terhadap permintaan luar wilayah dan respon dari sektor-non basis terhadap perubahan sektor basis. Pendekatan yang biasanya dilakukan terhadap masalah ini adalah mengabaikan masalah *time-lag* ini, akan tetapi tetap berdasarkan pada pernyataan bahwa dalam jangka panjang masalah *time-lag* ini pasti terjadi.

2.2.6 Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Regional

Menurut Glasson (1977) pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen ataupun exogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah atau faktor-faktor yang terdapat di luar daerah dan yang lebih baik yaitu kombinasi keduanya. Penentu-penentu penting yang berasal dari daerah itu sendiri meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Sedangkan salah satu penentu extern yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditas yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Teori pertumbuhan mengakui pentingnya struktur ekonomi dalam proses pertumbuhan regional, namun sifatnya yang agregatif seringkali menyembunyikan perbedaan-perbedaan perekonomian yang penting. Perekonomian tidaklah homogen dan beberapa perekonomian mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari pada yang lainnya. Karena perekonomian di suatu daerah berbeda dengan daerah lain, timbul kecenderungan untuk menarik kesimpulan bahwa antara struktur ekonomi dengan pertumbuhan regional terdapat suatu hubungan kausal.

Shift share, adalah suatu teknik analisis yang telah digunakan secara luas dalam meneliti faktor-faktor perkembangan regional. Kerangka kerja analitik ini, sangat berguna untuk mencermati perubahan perekonomian regional relative suatu daerah tertentu, terhadap perubahan perekonomian nasional dan “regional” selama periode waktu tertentu.

Menurut Budiharsono (2001), berdasarkan pada hasil analisis *shift share*, akan dapat diketahui bagaimana perkembangan suatu sektor ekonomi di suatu daerah, apabila diperbandingkan dengan secara relatif dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, apakah bertumbuh cepat, atau bertumbuh lambat. Hasil analisis *shift share* ini, juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pada analisis *shift share* ini diasumsikan bahwa perubahan produksi di suatu daerah/wilayah antara tahun dasar dengan tahun analisis dibagi menjadi 3 (tiga) komponen pertumbuhan, yaitu (Budiharsono, 2001): (a) komponen pertumbuhan nasional (*national share growth component*), (b) komponen pertumbuhan proporsional atau komponen industrial mix (*proportionity shift component or industrial mix growth component*), dan (c) komponen pertumbuhan pangsa wilayah (*regional share*).

Pertumbuhan regional (G_j) dapat diuraikan menjadi komponen-komponen '*shift*' dan '*share*', yaitu (Glasson, 1978 dan Sitohang, 1990): (a) *national share* (komponen pertumbuhan nasional), (b) *proportionality shift component* (komponen pertumbuhan proporsional atau komponen struktur industri/*industrial mix*), dan (c) *differential shift component* (komponen lokasional atau regional)

Kedua komponen '*shift*' tersebut (*proportionality shift component* dan *differential shift component*) ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat '*extern*' dan yang bersifat '*intern*'. Dimana '*proportionality shift component*' sebagai akibat dari pengaruh unsur-unsur 'luar' yang bekerja secara nasional, dan '*differential shift component*' sebagai akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja 'di dalam' daerah yang bersangkutan.

Dengan menggunakan notasi aljabar, berbagai komponen tersebut di atas dapat dinyatakan sebagai berikut (Glasson, 1978 dan Sitohang 1990):

$$\begin{aligned}
 G_j &= E_{jt} - E_{jo} \\
 &= (N_j + P_j + D_j) \\
 N_j &= E_{jo} (E_t/E_o) - E_{jo} \\
 (P + D)_j &= E_{jt} - (E_t/E_o) \cdot E_{jo} \\
 &= (G_j - N_j) \\
 &= S_j \\
 P_j &= \sum_i [(E_{it}/E_{io}) - (E_t/E_o)] E_{ijo} \\
 D_j &= \sum_t [E_{ijt} - (E_{it}/E_{io}) E_{ijo}] \\
 &= (P + D)_j - (P_j)
 \end{aligned}$$

Dimana:

- G_j = Pertumbuhan regional total daerah *ke-j*.
 E = Nilai PDB dalam harga konstan.
 E_j = Nilai PDB daerah *ke-j* dalam harga konstan.
 N_j = Komponen *national share* daerah *ke-j*, dan/atau pertumbuhan daerah *ke-j* apabila tingkat pertumbuhannya diasumsikan sama dengan pertumbuhan nasional.
 $(P+D)_j$ = Komponen *net shift* bagi daerah *ke-j*.
 S_j = *Shift*, dan/atau penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan perekonomian regional daerah *ke-j*.
 P_j = Komponen *proportionality shift* bagi daerah *ke-j*.
 D_j = Komponen *differential shift* bagi daerah *ke-j*.
 i = Sektor *ke-i*.
 0 = Tahun awal.
 t = Tahun akhir.

(a) National Share Growth Component/National Share

Komponen pertumbuhan nasional atau *national share* (G_j), adalah banyaknya produksi perekonomian yang diharapkan di suatu daerah tertentu apabila pertumbuhannya mengikuti pertumbuhan nasional pada periode waktu tertentu (Glasson, 1978 dan Sitohang, 1990). Komponen pertumbuhan nasional (*national share growth component*) adalah perubahan produksi perekonomian suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi perekonomian secara nasional (Budiharsono, 2001). Apabila diasumsikan tingkat pertumbuhan perekonomian daerah tersebut sama dengan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional.

Ketentuan satuan wilayah nasional sebagai indikator pembanding, dapat dialihkan (dipergantikan) dengan satuan wilayah global tertentu (Glasson, 1978). Misalkan suatu Provinsi terhadap nasional, atau suatu kabupaten terhadap Provinsi, atau suatu daerah terhadap wilayah. Di dalam aplikasinya di dalam penelitian ini, satuan wilayah 'nasional' sebagai indikator pembanding digantikan oleh kesatuan 'wilayah regional', yaitu kesatuan Wilayah Tapal Kuda khususnya Sub-Wilayah Pulau Madura.

(b) *Shift Component*

Glasson (1978) dan Sitohang (1990) menyebutkan, komponen *shift* (Sj) adalah nilai penyimpangan (*deviation*) dari *nasional share* dalam pertumbuhan perekonomian daerah (**cat:** nilai $G_j - N_j$). Penyimpangan ini adalah 'positif' di daerah-daerah yang bertumbuh dengan 'baik', dan 'negatif' di daerah-daerah yang relatif 'merosot'. Pertumbuhan baik ataupun merosot yang terjadi tersebut menurut Glasson (1978), adalah akibat dari adanya pengaruh faktor-faktor 'luar' yang bekerja secara nasional (*proportionality shift component*), dan pengaruh faktor-faktor yang bekerja 'di dalam' daerah karena keuntungan-keuntungan lokasional yang dimiliki (*differential shift component*).

Mengikuti Budiharsono (2001), interpretasi pengambilan keputusan yang didapatkan adalah:

- (1) Apabila nilai *shift* yang didapatkan adalah 'lebih besar' dari 0 (nol) atau 'positif', maka pertumbuhan daerah tersebut termasuk ke dalam kelompok 'progresif (maju)'.
- (2) Sedangkan apabila nilai *shift* yang didapatkan adalah 'lebih kecil' dari 0 (nol) atau 'negatif', maka pertumbuhan daerah tersebut termasuk 'lamban'.

(c) ***Proportionality Shift Component/ Industrial Mix Growth Component***

Komponen pertumbuhan proporsional (*proportionality shift component*), atau komponen struktur atau industrial mix (*industrial mix growth component*), memiliki fungsi untuk mengetahui apakah karakteristik pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tertentu sudah ‘terspesialisasi’ pada sektor-sektor ekonomi yang teridentifikasi bertumbuh dengan ‘cepat’, atau ‘belum’.

Glasson (1978) dan Sitohang (1990) menyatakan, *proportionality shift component* (Pj) kadang-kadang dinamakan komponen ‘struktur’ atau ‘industrial mix’ adalah, untuk mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini adalah ‘positif’ di daerah-daerah yang ‘terspesialisasi’ dalam sektor-sektor yang secara nasional bertumbuh dengan ‘cepat’, dan ‘negatif’ di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional bertumbuh dengan ‘lambat’ atau bahkan sedang ‘merosot’.

Terkait dengan hal ini Budiharsono (2001) menyatakan, interpretasi pengambilan keputusan yang didapatkan adalah:

- (1) Apabila nilai komponen pertumbuhan proporsional adalah ‘lebih kecil’ dari 0 (nol) atau ‘negatif’, menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah tersebut memiliki pertumbuhan yang ‘lambat’.
- (2) Sedangkan apabila bernilai ‘lebih besar’ dari 0 (nol) atau ‘positif’, menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah tersebut memiliki pertumbuhan yang ‘cepat’.

Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri (misalnya; kebijakan perpajakan, subsidi dan *price support*), serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.

(d) *Regional Share Component/Differential Shift Component*

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (*regional share component*), atau *defferential shift component*, memiliki fungsi untuk mengetahui apakah suatu daerah memiliki 'keuntungan-keuntungan lokasional intern', dimana keuntungan lokasional tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung/ pendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di daerah yang bersangkutan yang secara nasional teridentifikasi 'bertumbuh secara cepat'.

Glasson (1978) dan Sitohang (1990) menyatakan, *defferential shift component* (Dj) kadang-kadang dinamakan komponen 'lokasional' atau 'regional', adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur besarnya '*shift regional netto*' yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang bertumbuh lebih 'cepat' atau lebih 'lambat' di daerah yang bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional 'intern'. Jadi suatu daerah mempunyai keuntungan-keuntungan lokasional, seperti sumberdaya yang baik, akan mempunyai '*differential shift component*' yang 'positif', sedangkan daerah-daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai '*differential shift component*' yang 'negatif'.

Terkait dengan hal ini Budiharsono (2001) menyebutkan, interpretasi pengambilan keputusan yang didapatkan adalah:

- (1) Apabila nilai *regional share component* adalah 'lebih besar' dari 0 (nol) atau 'positif', maka berarti bahwa wilayah tersebut mempunyai daya saing yang baik apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Atau dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut mempunyai *comparative advantage* bila dibandingkan dengan wilayah lainnya.
- (2) Sedangkan apabila nilai *regional share component* adalah 'lebih kecil' dari 0 (nol) atau 'negatif', maka berarti wilayah yang bersangkutan tidak dapat bersaing dengan baik apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Adapun Lucas dan Primms dalam Budiharsono (2001) menyatakan, komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB dalam suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya

ditentukan oleh keunggulan komparatif (*comparative advantages*), akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana social dan ekonomi, serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut.

2.3 Konsepsi Otonomi Daerah

Menurut Basri (2002), otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan Negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.

Otonomi daerah dapat dilaksanakan jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah subnasional. Walaupun ada pandangan yang menyebutkan bahwa otonomi dapat saja dilaksanakan tanpa adanya pendistribusian atau pengalokasian pembiayaan atau keuangan, tetapi otonomi harus dikaitkan dengan konteks politik karena otonomi berkaitan langsung dengan persoalan pemerintahan dalam suatu Negara. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama pentingnya di dalam sistem pemerintahan suatu Negara. Tidak mungkin pemerintah daerah yang otonom terlepas dari pusat dari aspek politik dan geografi. Oleh sebab itu, daerah otonom merupakan satu kesatuan dengan pemerintah pusat dalam suatu Negara (Saragih, 2003).

Suatu daerah bila telah menetapkan daerahnya sebagai daerah otonom, maka daerah tersebut tidak lepas dari potensi yang ada serta daya dukung yang telah dimilikinya. Beberapa hal yang membuat suatu daerah memutuskan menjadi daerah otonom yaitu telah memiliki kesiapan dalam hal sumber daya alam, sarana dan prasarana, modal yang tersedia, serta kemampuan sumber daya manusia. Dari

adanya beberapa hal tersebut perlu adanya pemanfaatan yang optimal dalam hal pembangunan daerah terutama dalam bidang ekonomi.

Terkait adanya pemanfaatan yang optimal dalam hal pembangunan daerah tersebut maka suatu daerah dapat mengembangkan daerahnya menjadi satu kesatuan daerah perencanaan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi regional agar lebih berkembang. Perencanaan perekonomian regional itu sendiri diharapkan setelah otonomi daerah perkembangan daerahnya menjadi lebih baik sesuai dengan sektor ekonomi basisnya yang memberi dukungan terhadap perekonomian suatu daerah. Selain itu dengan adanya perubahan atau pergeseran yang terjadi selama periode setelah otonomi daerah pada sektor ekonomi non-basis dan sektor ekonomi basisnya ataupun pergeseran dari nilai penggandaan basis pada suatu daerah diharapkan perkembangan perekonomian suatu daerah menjadi lebih progresif.

2.4 Kerangka Pemikiran

Suatu daerah bila telah menetapkan daerahnya sebagai daerah otonom, maka daerah tersebut tidak lepas dari potensi yang ada serta daya dukung yang telah dimilikinya. Beberapa hal yang membuat suatu daerah memutuskan menjadi daerah otonom yaitu telah memiliki kesiapan dalam hal sumber daya alam, sarana dan prasarana, modal yang tersedia, serta kemampuan sumber daya manusia. Dari adanya beberapa hal tersebut perlu adanya pemanfaatan yang optimal dalam hal pembangunan daerah terutama dalam bidang ekonomi. Terkait dengan wilayah Tapal Kuda yang merupakan sebuah kawasan di provinsi Jawa Timur, tepatnya di bagian timur Pulau Jawa. Dinamakan Tapal Kuda, karena bentuk kawasan tersebut dalam peta mirip dengan bentuk tapal kuda.

Istilah tapal kuda itu sendiri lahir dari definisi perspektif pandangan subyektif. Hal tersebut mengandung arti bahwa mendefinisikan suatu wilayah untuk tujuan atau kepentingan tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Daerah-daerah yang termasuk dalam Wilayah Tapal Kuda tersebut diketahui mempunyai kemiripan dalam aspek: (a) geografi, (b) geologi, (c) iklim, dan (d) vegetasi. Karena hal itulah maka dapat didefinisikan sebagai daerah homogeneous

(*homogeneous region*). Selain itu daerah ini juga dapat dikatakan sebagai daerah nodal (*nodal region*) atau daerah fungsional (*functional region*). Dikatakan sebagai daerah nodal karena daerah ini dikuasai oleh beberapa pusat kegiatan ekonomi (*growth area*) dan memiliki hubungan fungsional dengan daerah belakangnya/*backwase area*.

Kawasan Tapal Kuda meliputi 3 Sub-Wilayah yaitu Pulau Madura, Teluk Madura, dan Selat Madura. Kesatuan Sub-Wilayah Pulau Madura meliputi: (i) Kab. Sumenep, (ii) Kab. Pamekasan, (iii) Kab. Sampang, dan (iv) Kab. Bangkalan. Kesatuan Sub-Wilayah Teluk Madura meliputi: (i) Kota Surabaya, dan (ii) Kab. Sidoarjo. Kesatuan Sub-Wilayah Selat Madura meliputi: (i) Kab. Pasuruan, (ii) Kota Pasuruan, (iii) Kab. Probolinggo, (iv) Kota Probolinggo, (v) Kab. Situbondo. Tapal kuda merupakan wilayah subkultur di Jawa Timur yang memiliki sejarah panjang pemberontakan.

Daerah yang menduduki sebagai *growth area* yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang termasuk dalam Sub-Wilayah Teluk Madura. Sedangkan yang menduduki sebagai *backwase area* yaitu Sub-Wilayah Pulau Madura dan Sub-Wilayah Selat Madura. Pertimbangan utama dalam menjadikan kawasan Sub-wilayah Teluk Madura sebagai *growth area* adalah, karena memiliki “keuntungan lokasional”. Potensi keuntungan lokasional ini diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi bagi pengusaha-pengusaha (pelaku usaha) di sektor industri, perdagangan dan jasa. Kedudukan sub-wilayah Teluk Madura sebagai *growth area* maka untuk daerah/wilayah lain di dalam satuan Wilayah Tapal Kuda, dapat dipresepsikan (didudukkan) sebagai daerah belakang (*backwase area*) dari daerah pusat pertumbuhan (*growth area*) tersebut. Sehingga mempunyai ketergantungan atau hubungan fungsional antara pusat pertumbuhan/*growth area* dan daerah belakangnya/*backwase area*, yaitu Sub-Wilayah Teluk Madura sebagai *growth area* yang mempunyai hubungan fungsional dengan Sub-wilayah Pulau Madura dan Sub-wilayah Selat Madura sebagai *backwase area*. Dari penelitian ini ingin mencermati perkembangan perekonomian regional dari Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda.

Untuk mencermati perkembangan perekonomian regional Sub-Wilayah Pulau Madura tersebut maka hal utama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi potensi sektor dan sub-sektor ekonomi basis dengan menggunakan pendekatan analisis LQ (*Location Quotients*). Melalui pendekatan analisis LQ dapat diketahui potensi sektor/sub sektor ekonomi basis di Sub-Wilayah Pulau Madura. Apabila nilai indeks LQ suatu sektor/sub-sektor ekonomi adalah 'lebih besar' dari 1 (satu), maka mengidentifikasi bahwa sektor/sub-sektor ekonomi yang bersangkutan adalah sektor/sub-sektor ekonomi 'basis'. Dan apabila nilai indeks LQ suatu sektor ekonomi adalah 'lebih kecil' dari 1 (satu), maka mengidentifikasi bahwa sektor/sub-sektor ekonomi yang bersangkutan adalah sektor/sub-sektor ekonomi 'bukan basis' atau 'non-basis'. Identifikasi ini dilakukan pada periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah, dan pada periode setelah pelaksanaan otonomi daerah. Dari perbandingan periode tersebut maka akan diperoleh identifikasi perubahan keberadaan potensi sektor dan sub-sektor basis.

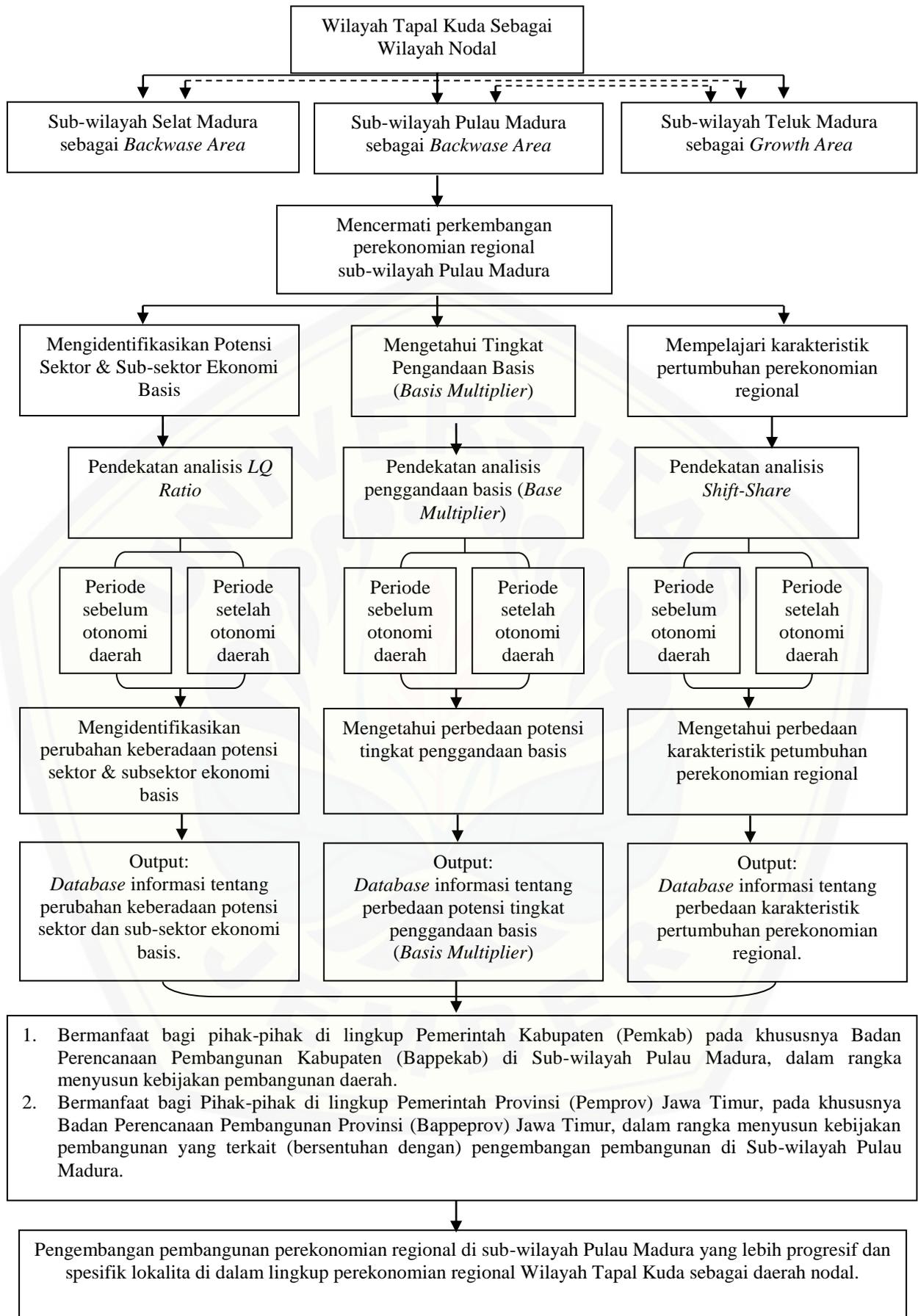
Selain itu guna mencermati perkembangan perekonomian regional Sub-Wilayah Pulau Madura yaitu dengan mengetahui tingkat penggandaan basis dengan menggunakan pendekatan analisis penggandaan basis (*base multiplier*). Dengan mempergunakan pendekatan analisis *base multiplier* dapat diketahuinya besar nilai kembalian (*outcome*) dari setiap satu satuan mata uang yang di investasikan pada sektor/sub-sektor ekonomi basis di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup Wilayah Tapal Kuda. Besar nilai kembalian (*outcome*) yang akan didapatkan oleh keseluruhan perekonomian regional, apabila dilakukan investasi satu satuan mata uang pada sektor/sub-sektor ekonomi basis tersebut. Apabila nilai penggandaan basis tersebut 'relatif tinggi', maka ada 'peluang' nilai *outcome* investasi yang ditanamkan pada sektor/sub-sektor ekonomi basis tersebut juga 'relatif tinggi'. Tingkat penggandaan basis (*base multiplier*) ini dilihat dari 2 (dua) periode yaitu periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan pada periode setelah pelaksanaan otonomi daerah. Hasil yang diperoleh nantinya yaitu akan diketahui perbedaan potensi tingkat penggandaan basis.

Selain itu juga guna mencermati perkembangan perekonomian regional Sub-Wilayah Pulau Madura yaitu dengan mempelajari karakteristik pertumbuhan perekonomian regional dengan menggunakan pendekatan analisis *shift share*. Dengan menggunakan pendekatan analisis *shift share* dapat diketahuinya pertumbuhan perekonomian regional di Sub-Wilayah Pulau Madura memiliki karakteristik cepat atau lambat. Metode ini cukup efektif digunakan untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya dengan cara menekankan bagian-bagian pertumbuhan sektor ekonomi di daerah dan memproyeksikan kegiatan ekonomi daerah tersebut dengan data yang terbatas selama periode waktu tertentu (Glasson, 1977 dan Sitohang, 1990). Lebih spesifik analisis ini digunakan untuk mengukur perkembangan perekonomian di Sub-Wilayah Pulau Madura. Karakteristik pertumbuhan perekonomian regional ini dilihat pada 2 (dua) periode yaitu periode sebelum otonomi daerah dan pada periode setelah otonomi daerah. Hasil yang diperoleh nantinya yaitu akan diketahui perbedaan karakteristik pertumbuhan perekonomian regional.

Dari ketiga analisis tersebut nantinya dihasilkan output dari masing-masing alat analisis yang digunakan. Untuk identifikasi perubahan keberadaan potensi sektor dan sub-sektor ekonomi basis maka output yang dihasilkan yaitu diperoleh data base informasi tentang perubahan keberadaan sektor dan sub-sektor basis. Sedangkan output yang dihasilkan dari perbedaan potensi tingkat penggandaan basis yaitu data base informasi tentang perbedaan potensi tingkat penggandaan basis. Sedangkan output yang dihasilkan dari perbedaan karakteristik pertumbuhan perekonomian regionalnya yaitu diperolehnya data base informasi tentang perbedaan karakteristik pertumbuhan perekonomian regional. Hal tersebut bisa dicermati dengan adanya otonomi daerah keberadaan potensi sektor dan sub-sektor ekonomi basis yang ada berubah atau tidak, sedangkan potensi tingkat penggandaan basisnya meningkat atau bahkan menurun, dan tingkat karakteristik pertumbuhan perekonomian regionalnya bertumbuh cepat atau lambat.

Ketiga output yang dihasilkan tersebut maka akan muncul manfaat bagi pihak-pihak di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) di Sub-wilayah Pulau Madura, dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan daerah. Selain itu juga bermanfaat bagi pihak-pihak di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, pada khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jawa Timur, dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan yang terkait (bersentuhan dengan) pengembangan pembangunan di Sub-wilayah Pulau Madura.

Guna mencermati perkembangan perekonomian regional di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur, akan didekati dengan ekonomi basis. Pendekatan ekonomi basis (*base multiplier*), penggandaan basis (*base multiplier*), dan analisis *shift share* sebagai bahan dalam memahami kondisi perkembangan perekonomian di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup Wilayah Tapal Kuda. Dari adanya pendekatan tersebut serta manfaat yang diperoleh maka nantinya akan terealisasi berupa pengembangan perekonomian regional di Sub-Wilayah Pulau Madura yang lebih progresif dan spesifik lokalita didalam lingkup perekonomian regional wilayah Tapal Kuda sebagai daerah nodal.



Gambar 3. Skema Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

1. Terjadi perubahan keberadaan potensi sektor dan sub-sektor ekonomi basis di Sub-Wilayah Pulau Madura didalam lingkup perekonomian regional wilayah Tapal Kuda sebagai daerah nodal dari periode sebelum ke setelah pelaksanaan otonomi daerah.
2. Ada perbedaan yang nyata pada potensi penggandaan basis (*base multiplier*) di Sub-Wilayah Pulau Madura didalam lingkup perekonomian regional wilayah Tapal Kuda sebagai daerah nodal antara sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah.
3. Ada perbedaan pada karakteristik pertumbuhan (*characteristic of growth*) perekonomian regional di Sub-Wilayah Pulau Madura didalam lingkup perekonomian regional wilayah Tapal Kuda sebagai daerah nodal antara sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah.